

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.



Sumber: <https://kimurcahyo.wordpress.com>

REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Sumber: <https://kimurcahyo.wordpress.com>

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Copyright © 2016
bandi.staff.fe.uns.ac.id.

Tujuan Pembelajaran pada sesi ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami Penganggaran Daerah
2. Memahami dasar hukum pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah
3. Memahami perubahan-perubahan mendasar di dalam pengelolaan keuangan daerah
4. Memahami pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah
5. Memahami pengertian pengelolaan keuangan daerah
6. Memahami esensi perencanaan dan penganggaran daerah
7. Menelusur sumber acuan

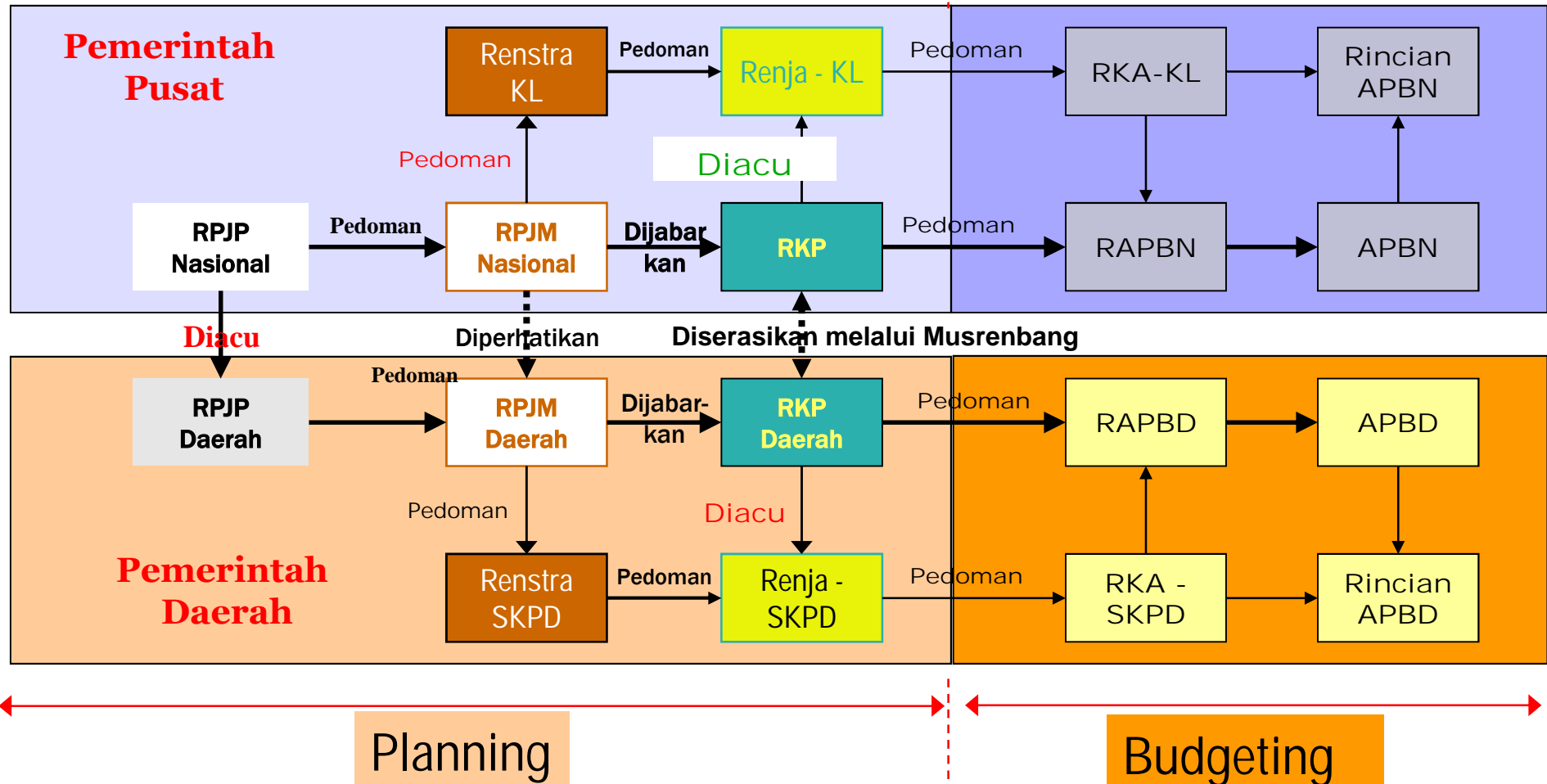
Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

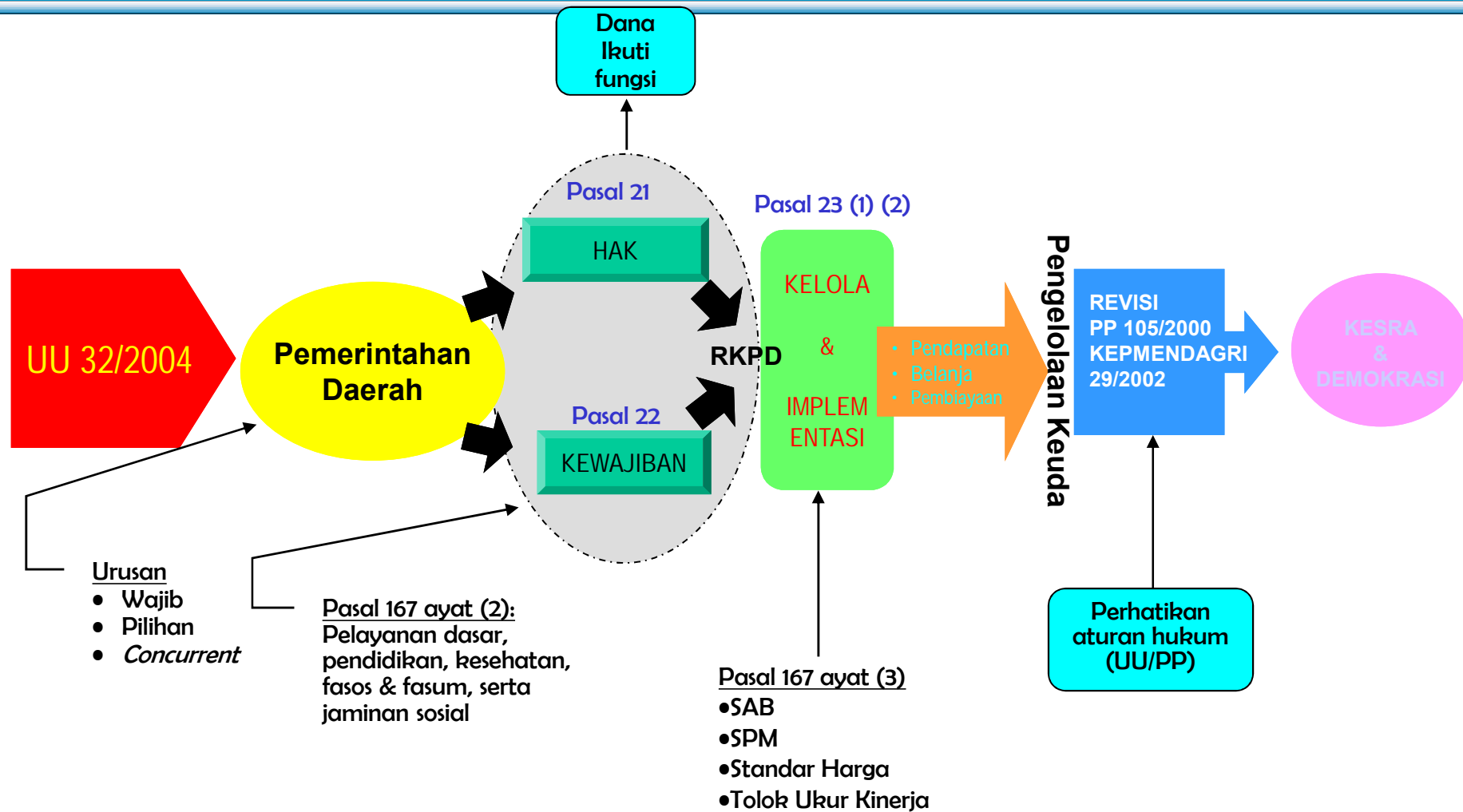
Learning Objectives

1. Memahami Penganggaran

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



DESAIN (AWAL) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami dasar hukum pemerintah daerah

Pendahuluan

- Perencanaan dan penganggaran daerah = elemen penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (PKD).
 - tidak terlepas dari kerangka hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - manajemen keuangan di sektor pemerintahan lebih mengedepankan pada aspek ketaatan terhadap peraturan
 - Manajemen keuangan pemerintah bertujuan akhir yaitu memaksimalkan kemakmuran rakyat (*stakeholders*), berbeda dengan manajemen keuangan di sektor privat yang selalu mengedepankan aspek teori dan pendekatan *the best practice* dengan tujuan akhir yaitu memaksimalkan perolehan laba bagi para pemiliknya (*stockholders*).

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami dasar hukum pemerintah daerah

Dasar Hukum

Undang-Undang (awal):

- UU 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
- UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- UU 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah:

- PP 23/2005 tentang PK BLU;
- PP 74/2012

Peraturan Menteri:

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami dasar hukum pemerintah daerah

Dasar Hukum

Pemerintah Daerah

Undang-Undang (awal - 2015):

1. UU 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU 8/ 2008 = 1 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU 12/ 2008 = 2 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. **UU 23/ 2014** tentang Pemerintahan Daerah → **Rinci**, beberapa pasal diubah
6. UU 2/2015 = 1 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU 9/ 2015 = 2 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Menteri:

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pengelolaan keuangan daerah (PKD) era praotonomi daerah dilaksanakan berdasarkan UU 5/ 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintah Daerah.
 - Daerah di era ini adalah daerah tingkat I, yaitu propinsi; dan daerah tingkat II, yaitu kabupaten atau kotamadya

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD era praotonomi

1. PP 5/ 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
2. PP 6/ 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
3. Kepmendagri 900-099/ 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
4. Permendagri 2/ 1994 tentang Pelaksanaan APBD.
5. UU 18/ 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. KepMendagri 3/ 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD era praotonomi, ciri-ciri:

1. tidak terdapat pemisahan secara konkret antara eksekutif dan legislatif → (psl 13 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1975),
2. Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah → (pasal 33 PP No. 6 Tahun 1975)
3. Bentuk laporan perhitungan APBD terdiri atas:
 - a. Perhitungan APBD
 - b. Nota Perhitungan
 - c. Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan dilengkapi dengan lampiran Ringkasan Perhitungan Pendapatan dan Belanja → (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 dan Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999).

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD era praotonomi, ciri-ciri:

4. Pinjaman, baik pinjaman pemerintah daerah (Pemda) maupun pinjaman BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah, yang dalam struktur APBD menurut Kepmendagri No. 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah masuk dalam pos penerimaan pembangunan.
5. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD saja, belum melibatkan masyarakat.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD era praotonomi, ciri-ciri:

6. Indikator kinerja pemerintah daerah mencakup:
 - a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
 - b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya
 - c. Target dan persentase fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran Perhitungan APBD (Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan APBD).
7. Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Perhitungan APBD baik yang dibahas DPRD maupun yang tidak dibahas DPRD tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD era otonomi, ciri-ciri:

- Era otonomi daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- Ada reformasi pengelolaan keuangan daerah yang merupakan tindak lanjut dari kedua undang-undang otonomi daerah tersebut.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD era otonomi, ciri-ciri:

- Perkembangan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah di era otonomi ini dapat dikelompokkan menjadi dua periode, yaitu
 - a) Periode Prareformasi bidang Keuangan Negara dan
 - b) Periode Pascareformasi bidang Keuangan Negara. Penjelasan secara rinci mengenai perkembangan peraturan tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode Prareformasi:

- Untuk melaksanakan UU 22/1999 dan UU 25/1999, Pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan pelaksanaannya, antara lain:
 1. PP 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 2. PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 3. PP 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 4. PP 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode Prareformasi:

5. PP108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. PP109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah;
7. PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD;
8. KepMendagri 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode Prareformasi ciri-ciri:

1. Pengertian daerah berarti propinsi, kabupaten atau kota. Istilah pemerintah daerah tingkat I dan II; dan istilah kotamadya tidak lagi digunakan.
2. Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah adalah badan eksekutif, sedangkan DPRD adalah badan legislatif (pasal 14 UU No. 22 tahun 1999). Jadi terdapat pemisahan yang jelas antara legislatif dan eksekutif.
3. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah (pasal 5 PP No. 108/2000).

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode Prareformasi ciri-ciri:

4. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas:
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas; dan
 - d. Neraca Daerah (Pasal 38 PP No. 105/2000).
5. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan (yang menunjukkan hak pemerintah daerah), tetapi masuk dalam pos penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan). Anggaran belanja tidak lagi dibagi ke dalam belanja rutin dan belanja pembangunan.
6. Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun APBD di samping pemerintahan daerah yang terdiri unsur kepada daerah dan DPRD.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode Prareformasi ciri-ciri:

7. Indikator kinerja pemda tidak hanya mencakup:
 - a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
 - b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya
 - c. Target dan persentase fisik proyek tetapi juga meliputi standar pelayanan minimal.
8. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode reformasi ciri-ciri:

- Dengan keluarnya PP 105/ 2000 terjadi pergeseran mendasar (reformasi) PKD (APBD), menyangkut:
 - Sifat pertanggungjawaban (akuntabilitas)
 - Penganggaran
 - Pengendalian dan audit
 - Prinsip penggunaan uang
 - Pusat Pertanggungjawaban
 - Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode reformasi ciri-ciri:

- Sifat pertanggungjawaban (akuntabilitas)
 - terjadi perubahan pola pertanggungjawaban dari akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas horizontal.
 - Sebelum reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi.
 - dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD.

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode reformasi ciri-ciri:

- Penganggaran

- Proses penyusunan anggaran berubah dari sistem tradisional yang menggunakan pendekatan inkremental dan *line item* ke sistem anggaran kinerja.
- Pada sistem anggaran tradisional pertanggungjawaban ditekankan pada setiap input yang dialokasikan.
- Pada sistem anggaran kinerja pertanggungjawaban tidak sekedar pada input tetapi juga pada output dan outcome.

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode reformasi ciri-ciri:

- Pengendalian dan audit
 - Pengendalian, audit keuangan dan kinerja telah ada, namun tidak berjalan dengan baik.
 - Penyebabnya adalah sistem anggaran tidak memasukkan kinerja.
 - Di era reformasi, karena sistem penganggaran menggunakan sistem kinerja, maka pelaksanaan pengendalian dan audit keuangan dan audit kinerja akan menjadi lebih baik.

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode reformasi ciri-ciri:

- Prinsip penggunaan uang
 - Penerapan prinsip *value for money* yang juga dikenal dengan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif).
 - dalam menggunakan sumber dana, pemda dituntut untuk selalu memperhatikan kewajaran dan keefektifan tiap pengeluaran rupiah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode reformasi ciri-ciri:

- Pusat Pertanggungjawaban
 - Penerapan pusat pertanggungjawaban menjadi lebih jelas.
 - Contoh:
 - dinas pendapatan daerah merupakan pusat pendapatan.
 - sekretariat daerah merupakan pusat biaya, dan
 - BUMD diperlakukan sebagai pusat laba.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode reformasi ciri-ciri:

- Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
 - Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan hal penting dalam reformasi keuangan daerah, karena dengan adanya sistem ini maka pemda akan dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode Pasca reformasi:

- reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara baru bergulir sejak ditetapkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu:
 1. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode Pasca reformasi:

- Paket UU bidang keuangan negara membawa implikasi penyesuaian (revisi) sejumlah peraturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah,

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode Pasca reformasi, aturan pelaksanaan paket 3 UU Keuangan:

1. UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pengganti UU No. 22 tahun 1999);
2. UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (pengganti UU No. 25 tahun 1999);
3. PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (terakhir direvisi dengan PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004)

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode Pasca reformasi, aturan pelaksanaan paket 3 UU Keuangan:

4. PP 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
5. PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. PP 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. PP 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
8. PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti PP 105 tahun 2000);

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD Periode Pasca reformasi, aturan pelaksanaan paket 3 UU Keuangan:

9. PerMendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti Kepmendagri No. 29 Tahun 2002), sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007;
10. PerMendagri 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (berkaitan dengan PP 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP No. 24 Tahun 2004).

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD: diatur di dalam PP 58/ 2008 antara lain, mencakup:

- a) Tata cara penyusunan, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004.
- b) Desentralisasi pengelolaan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD): kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dan menyusun laporan keuangan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- c) Refungsi sekretaris daerah sebagai *the second man* bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD: diatur di dalam PP 58/ 2008 antara lain, mencakup:

- d) Pendekatan penyusunan APBD dengan 3 (tiga) pendekatan: pendekatan anggaran berbasis kinerja, pendekatan anggaran terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
- e) Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP, PP 24/2005). Laporan keuangan setidaknya meliputi:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran
 - 2) Neraca
 - 3) Laporan Arus Kas
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan (tidak ada lagi komponen laporan keuangan yang disebut Nota Perhitungan, sebagaimana disebutkan di PP 105/2000)
- f) Sistem UUDP diubah menjadi UYHD (sistem Uang Persediaan).

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perubahan pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD: diatur di dalam PP 58/ 2008 antara lain, mencakup:

- f) Sistem UUDP diubah menjadi UYHD (sistem Uang Persediaan).

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami pengertian keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

PKD berdasar PP 58/ 2008: keuangan daerah

- adalah semua hak dan kewajiban daerah
- dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
- yang dapat dinilai dengan uang
- termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Pengertian keuangan daerah tersebut secara operasional dijabarkan ke dalam ruang lingkup keuangan daerah

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah-Ruang Lingkup

ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi:

- a) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) penerimaan daerah;
- d) pengeluaran daerah;
- e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah-Ruang Lingkup

Pengelolaan keuangan daerah berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi

- perencanaan,
- pelaksanaan,
- penatausahaan,
- pelaporan,
- pertanggungjawaban, dan
- pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Pengelolaan Keuangan Daerah-Ruang Lingkup

- Kegiatan perencanaan/penganggaran merupakan awal dari siklus pengelolaan keuangan daerah
- yang memiliki makna yang krusial dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dalam satu tahun anggaran yang direncanakan.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

- perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintahan, penyusunannya berpedoman pada UU 25/ 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahamkan perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

- Penganggaran diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran; dan
- Anggaran (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan vs Penganggaran

- Dalam konteks penyusunan anggaran pemerintah, pada tahap-tahap tertentu agak sulit untuk membedakan antara domain perencanaan dan penganggaran.
 - Sebagai contoh, apakah penyusunan dokumen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) ataupun PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) itu masuk domain perencanaan atau penganggaran?
 - Jawabannya bisa tidak seragam (*debateble*), karena dokumen tersebut merupakan irisan antara proses perencanaan dan penganggaran.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan vs Penganggaran

- dalam definisi pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 1, PP 58/ 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak digunakan istilah ‘perencanaan dan penganggaran’ melainkan hanya ‘perencanaan’.
 - Hal ini berarti bahwa di dalam istilah perencanaan tersebut sekaligus mengandung makna penganggaran.

1. Memahamkan perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan vs Penganggaran

- Dalam pasal 1, PP 58/ 2005: pengelolaan keuangan daerah
 - adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - Aktivitas perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sebagai tahapan paling krusial dan kompleks dibandingkan dengan aktivitas lainnya di dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
 - Hal ini bisa kita lihat dari beberapa alasan berikut ini:

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahamkan perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan dan Penganggaran kompleks dalam PKD:

- a. Perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal dari serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiatan yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil yang baik/tepat sasaran.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan dan Penganggaran kompleks dalam PKD:

- b. Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) baik masyarakat, pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi (propinsi dan pusat) yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai di tingkat propinsi dan nasional untuk menyerasikan antara perencanaan pemerintah kabupaten/kota/propinsi dan pemerintah pusat (perencanaan nasional).

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan dan Penganggaran kompleks dalam PKD:

- c. Perencanaan Daerah disusun dalam spektrum jangka panjang (20 tahun) yang disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah); jangka menengah (5 tahun) yang disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah); dan jangka pendek (satu tahun) yang disebut RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan dan Penganggaran kompleks dalam PKD:

- d. Penyusunan APBD harus dibahas bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan setelah disetujui bersama kemudian harus dievaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah propinsi/pemerintah pusat c.q. Menteri Dalam Negeri).
- e. Anggaran mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (dijelaskan di bab berikutnya).

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahamkan perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

- Setelah tahap perencanaan dan penganggaran selesai dilaksanakan, tahap berikutnya merupakan domain pemerintah daerah selaku eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pengawasan dan akhirnya ditutup dengan tahap pertanggungjawaban.
- Semua tahap dalam siklus pengelolaan keuangan daerah saling terkait erat dan setiap tahap tentunya memegang peranan penting dalam menyukseskan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- tahap perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan paling krusial dan kompleks dengan sejumlah alasan yang dijelaskan di atas.

Referensi

Learning Objectives

6. Menelusur sumber acuan

- Mulyana, Budi. 2010. *MODUL Perencanaan dan Penganggaran Daerah. PPAKD Diklat Akuntansi Keuangan Daerah*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kementerian Keuangan.
- Undang-undang Nomor: 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor: 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor: 8/ 2008 = 1 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor: 12/ 2008 =2 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- **Undang-undang Nomor: 23/ 2014** tentang Pemerintahan Daerah → **Rinci**, beberapa pasal diubah
- Undang-undang Nomor: 2/2015 =1 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor: 9/ 2015 =2 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Referensi

Learning Objectives

6. Menelusur sumber acuan

- Undang-undang Nomor: 14 tahun 2015 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016*
- Indradi, Sjamsiar. 2014. *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah*. <http://sjamsiarfiaub.lecture.ub.ac.id/>. Diunduh Monday, September 29, 2014; 5:42:23 PM